

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Thailand adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan India sampai ke laut China. Secara umum, dikawasan Asia Tenggara ini banyak dihuni oleh bangsa-bangsa beretnis melayu. Sebagai contoh, melayu Malaysia, Melayu Brunai, Melayu Singapura, Melayu Indonesia, Melayu Moro (Philipina) dan Melayu Patani, kawasan ini juga dikenal dengan nusantara melayu atau alam melayu.

Dalam sudut pandang sejarah, Thailand merupakan satu-satu negara yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa barat, namun demikian bukan berarti kawasan ini adalah kawasan yang selalu aman dan terlepas dari permasalahan-permasalahan (konflik) dalam wilayah-wilayahnya. Konflik yang terjadi adalah konflik antara Pemerintah Thailand dengan kaum minoritas yaitu Bangsa Melayu Islam Patani.

Konflik yang terjadi dalam negara Thailand ini bukan konflik yang baru, konflik ini telah terjadi setelah proses peluasan wilayah Patani ke bawah system pemerintahan kerajaan Thailand pada tahun 1785. Setelah dari pelaksanaan kebijakan aneksisi ini, mulai lahirnya penentangan dari kaum minoritas dan berterusan sampai hari ini. Pada awalnya penentangan itu hanya sebatas penentang dari golongan raja-raja melayu (Raja Patani, Raja Yala, dan Raja Iegeh). Namun semakin hari konflik itu semakin agresif dalam tindakannya.

Setelah wilayah Patani dianeksasi ke dalam wilayah kekuasaan Thailand pada tahun 1902 melalui perjanjian anglo siam-inggeri (*anglo Siam-Inggeris Treaty*), adapu isi perjanjian itu sebagai berikut:

“Memhapus kekuasaan raja-raja melayu serta menepatkan wilayah Patani bukan lagi sebagai sebuah kerajaan melayu yang merdeka dan bertaulat (*Kingdom Of Patani Malay*)”

Setelah termatrainya perjanjian itu, penentangan kaum minoritas muslim melayu Patani berubah menjadi kasus penentangan dan pembunuhan yang ekstrem dan terorganisir.

Dibawah kekuasaan pemerintah Thailand, kaum minoritas muslim melayu diasimilasi secara paksa melalui berbagai kebijakan-kebijakan negara (*state policy*) yang dibentuk oleh pemerintah telah menciptakan kesenjangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kondisi yang seperti ini semakin diperburuk dengan keputusan pemerintah Thailand untuk menciptakan negara modern dengan ideologi Buddhisme dan Militerisme. Elit politik dan sektor publik didominasi oleh etnis Thai baik itu di tingkat nasional maupun lokal dalam hirarki kekuasaan negara.

Selama kurun waktu pasca penerapan kebijakan secara paksa dari pemerintah Thailand itu, hubungan antara kaum minoritas-pemerintah dan kaum minoritas-masyarakat mayoritas (siam) semakin panas dan konradiktif. Banyak ketidakpuasan dari kalangan masyarakat minoritas terhadap penerapan kebijakan pemerintah Thailand yang dianggap tidak menghiraukan nilai-norma agama dan kebudayaan masyarakat selatan.

Akibat dari penerapan kebijakan secara paksa itu, banyak terjadinya aksi penentangan (ujukrasa) dari kaum minoritas muslim Patani seperti, 7 tuntutan Kiyai Hj. Sulong (otoritas wilayah otonomi), Tenggu Mahmood Mahyeedeem (otoritas negara federal tanah melayu),

namun kesudahan kesemua aksi itu disambut dengan tindakan kekerasan yang tidak berprikemanusiaan oleh pemerintah. Kiyai Hj. Sulong dan Tenggu Mahmood Muhyeedeen dibunuh secara kejam. Selain itu, gerakan kemerdekaan oleh Hj. Ustaz Amin Tokmina (menuntut otoritas kemerdekaan Patani) yang berakibat kepada pertumpahan darah, baik dari pihak aparat pemerintahan maupun warga sipil (komunitas muslim Patani dan komunitas Thai).

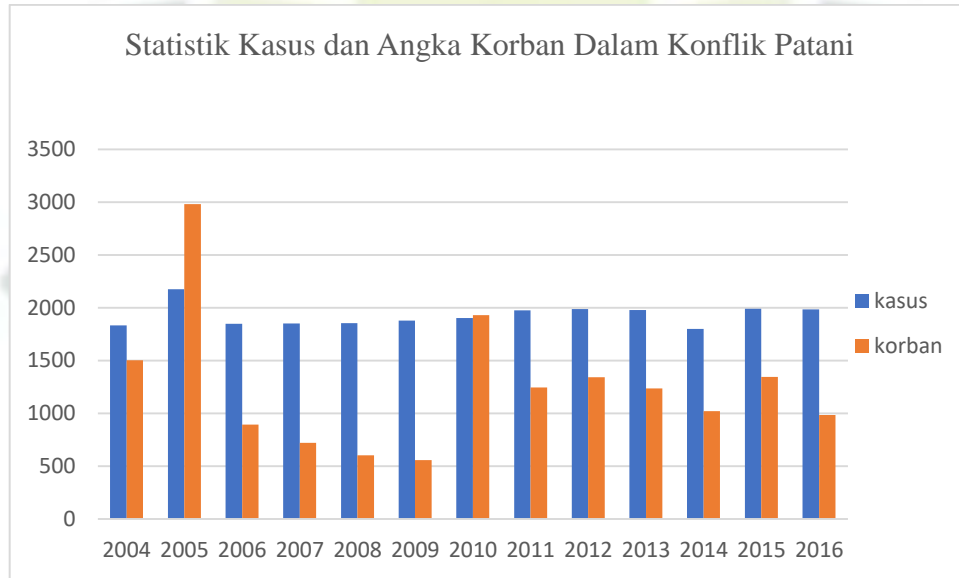
Pada awal tahun 2004 terjadi penyerangan pengalangan militer Thailand dan perampasan senjata di wilayah Narathiwat. Dalam peristiwa pada tanggal 04 Januari 2004 ini sebanyak 1,500 senjata api bersama amunisinya hilang. Setelah berlakunya peristiwa itu, banyak terjadi serangan-serangan dari pihak pemisah terhadap aparat militer Thailand serta serangan aparat terhadap pihak pemisah. Selain itu, akibat dari konflik bersenjata antara kedua pihak ini, masyarakat juga turut terkorban. Banyak kasus serangan salah sasaran yang dilakukan oleh pihak aparat pemerintah Thailand.

Setelah dari peristiwa itu, pemerintah menerapkan undang-undang darurat (*emergency law*) pada tanggal 05 Januari 2004. Undang-undang darurat militer ini memberi kuasa penuh kepada pihak militer dalam bertindak. Militer dapat menangkap dan menembak siapa pun yang dianggap sebagai orang-orang pergerakan sebagaimana undang-undang darurat dalam pasal 3 yang berbunyi “hak penuh bagi militer dalam melakukan apapun terhadap orang-orang yang di syakki pengganas” (UUDA Pasal 3 Tahun 2004).

Setelah dari penerapan kebijakan itu banyak korban terbunuh, baik secara langsung dan tidak langsung. Menurut statistic resmi pemerintah Thailand sebanyak 6,850 orang telah terkorban dan 15,547 orang cedera payah. Adapun rincian kasus sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Statistik Kasus Dan Angka Kematian**



*Data:*

*deepsouthwach.com*

Ekoran dari penentangan dari gerakan-gerakan itu, pemerintah telah menerapkan berbagai alternatif kebijakan dalam menangani permasalahan sengketa yang terjadi di Patani. Model alternatif kebijakan dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Patani yang pertama, dengan memperkuat pertahanan militer, seperti mengadakan post militer di sepanjang jalan raya (1 post per 7 kilometer) di seluruh empat provinsi dan memberi kekuasaan penuh kepada militer “*khot mai phisek no.44*” dalam bertindak dengan tanpa perintah mahkamah (DOM).

Semenjak cetusnya konflik bersenjata di Patani (selatan Thailand) tahun 2004 sampai sekarang 2017, berbagai-bagai kebijakan telah diterapkan untuk menangani permasalahan konflik bersenjata di Patani. Sehingga sekarang telah 10 wajah Perdana Menteri serta 10 panglima turus bahagian 4 (zone selatan) Thailand. Adapun di setiap pertukaran perdana menteri dan atau panglima turus bahagian 4, policy atau kebijakan-kebijakan di terapkan berbeda-beda

namun pada hakekat bersifat menindas dan memaksa yaitu melimpahkan wewenang mutlak kepada militer dalam bertindak dan militer bebas hukum.

Dari setiap kebijakan-kebijakan yang di terapkan khususnya di bagian selatan Thailand selama 17 tahun ini banyak memberi dampak negatif (menemui jalan buntu). Kebijakan yang di terapkan itu bukanlah membawa kepada penyelesaian konflik bersenjata di Patani, namun berakibat kepada bertambahnya rasa tidak-puas-hati terhadap pemerintah oleh masyarakat beretnis melayu di Patani.

Bertitik tolak dari permasalahan yang penulis paparkan dalam latar belakang masalah di atas itu, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai upaya-upaya dalam kebijakan menangani konflik antara komunitas muslim melayu dan pemerintah Thailand yang terjadi di Patani dengan judul: **ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI PATANI (TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF SOLUSI DAMAI DI PATANI).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari informasi akurat tentang kejadian dan fakta yang sebenar dan didukung oleh buku-buku sejarah, media sejarah dan politik serta islam di *muang Thai*. Artikel-artikel TUNAS aspirasi masyarakat melayu Patani lembaga-lembaga pemerintahan Thailand (*Islamic Council Of Narathiwat dan Southern Border Provinces Administration Centre*), maka fokus berikut penelitian ini berkenaan dengan analisis kebijakan pemerintah Thailand serta solusi damai dalam konflik di Patani.



### **C. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Thailand dalam menangani konflik di Patani?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan yang telah diterapkan pemerintah Thailand dalam kasus konflik di Patani?
3. Bagaimana solusi damai (kebijakan) yang benar untuk menangani permasalahan konflik berkepanjangan di Patani?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibawa dalam pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus yang akan menjawab terhadap persoalan yang terjadi seputar permasalahan yang dirumuskan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini, penulis ingin menjawab serta mengungkap fakta dan dampak dari kebijakan-kebijakan dalam mencari solusi damai dalam konflik di Patani.

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand dalam menangani konflik di Patani.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan dalam mencapai perdamaian dalam konflik bersejata di Patani.
3. Untuk mengetahui solusi damai terhadap konflik berkepanjangan di Patani.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Praktis**

#### **a. Pemerintah Thailand**

Sumbangan kontribusi praktis bagi memberi pemahaman akar konflik dan pengaruh dari kebijakan untuk menjadi damai konflik di Patani.

#### **b. Instansi**

Memberi kontribusi keilmuan baru mengenai permasalahan konflik bersejata kepada dunia pendidikan Negara-neraga lain sehingga dapat menjadi sumber perbandingan antar-negara.

#### **c. Penulis**

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar S1 ilmu politik dan ilmu sosial, khususnya dalam kajian analisa di bidang politik.

Sumbangan kontribusi praktis bagi memberi pemahaman akar konflik dan pengaruh dari kebijakan untuk menjadi damai konflik di Patani.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Sebagaimana diketahui, adanya perubahan social politik dan globalisasi dalam interaksi berbagai kehidupan manusia sekarang ini menuntut agar manusia itu lebih rasional dan obyektif terhadap kenyataan. Demikian pula dalam membuat kebijakan pemerintahan dalam menangani konflik yang terjadi dalam sebuah negara. Disamping harus sesuai dengan delema konflik semasa, juga harus sesuai dengan konstitusi pelebagaan negara.

Persoalan kebijakan menangani konflik yang lahir, bagi pemerintahan yang memiliki wilayah-wilayah kekuasaan suatu bangsa akan lebih kompleks. Selain keharusan menilai dan atau merubah sistem dalam pelebagaan negara, juga keharusan mengambil suatu alternatif kebijakan serta penyelesaian terhadap perubahan konflik untuk mendapat solusi damai. Sehubungan dengan itu, kompleksitas yang harus ditempuh oleh pemerintah serta seperangkat elemen tindakan-tindakan yang lebih rasional dan obyektif, penanganannya mungkin bukan hanya antara pemerintah dan masyarakat yang bersengketa yang menjadi sasaran konflik, akan tetapi juga diikuti dengan Negara kedua atau ketiga.

Sehubungan dengan itu, antara konsep teori yang terkait dengan fokus penelitian dalam menangani konflik adalah dengan menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah serta menilai atau mentransformasi akar terjadinya konflik berkepanjangan ini.

Lesswill dalam Dunn mendefinisikan tentang analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses dalam kebijakan (Dumm, 2012:1). Hall dalam Nugroho menyatakan terdapat dua jenis analisis kebijakan yaitu, analisis tentang kebijakan (*analysis of policy*) dan analisis untuk kebijakan (*analysis for policy*) (Nugroho, 2007:203). Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan.

1. Nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi.
2. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
3. Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.



Transformasi Konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi (Paul, 2003:23-24). Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

1. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
2. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik.
3. Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

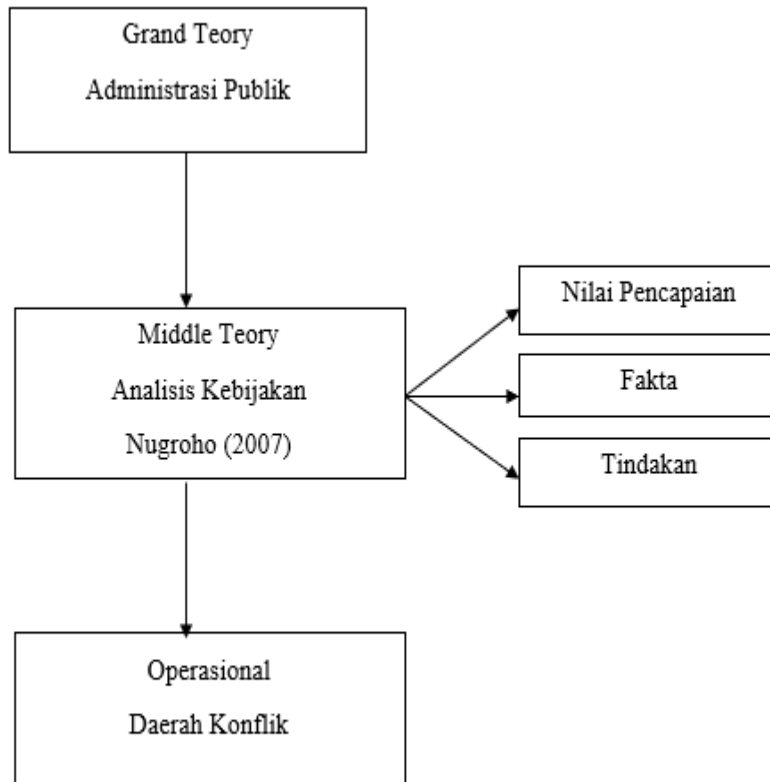
Dengan mengetahui akar terjadinya konflik berkepanjangan di Patani, maka pemerintah Thailand akan lebih mudah dalam mendapat alternatif yang baik serta berkesan dalam menangani konflik.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Gambar 1.2

Skema Kerangka Berpikir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG